

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama 5 minggu secara luring di Apotek Pro-Tha Farma yang dimulai 18 Oktober – 20 November 2021 dapat disimpulkan bahwa selama kegiatan PKPA di Apotek Pro-Tha Farma calon apoteker dapat :

1. Mengetahui tugas dan tanggung jawab apoteker yang dibutuhkan dalam kegiatan kefarmasian di apotek dan mampu berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien.
2. Mengetahui wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman mengenai pengelolaan obat dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Berkesempatan untuk melihat dan mempelajari kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas diapotek baik dari segi kefarmasian (melakukan pelayanan) ataupun managerial.
4. Dalam Pelayanan kefarmasian calon apoteker harus mampu berperan aktif dalam pelayanan kepada pasien baik terkait Analisa resep, komunikasi dua arah, pemberian informasi terkait cara penggunaan, Pelayanan Informasi Obat (PIO) dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), serta pemberian pelayanan obat non – resep.
5. Mengaplikasikan ilmu teori yang dapat dibanku kuliah dengan keadaan sebenarnya yang ada dilapangan. Selain menumbuhkan rasa percaya diri.

5.2 Saran

Saran yang akan diperoleh berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan selama 5 minggu sebagai berikut :

1. Mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) perlu meningkatkan pengetahuan kefarmasian, kepercayaan diri dan pembelajaran komunikasi yang efektif untuk keperluan dalam kegiatan PKPA.
2. Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien mengerti bagaimana cara penggunaan obat yang benar dan dapat menambah kepatuhan dalam penggunaan obat.
3. Calon apoteker diharapkan mempelajari Standart Operasional Prosedur (SOP) yang ada diapotek dan melakukan dengan benar, sehingga terhindar dari kesalahan yang dapat terjadi.
4. Peningkatan kegiatan farmasi klinis seperti konseling, pendokumentasian *Patient Medication Record* (PMR), Pemantauan Terapi Obat (PTO).

DAFTAR PUSTAKA

Anief, M. 2008, Manajemen Farmasi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

B POM RI, 2016 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 07 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, Jakarta

B POM RI., 2005, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.5.1384 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.

Depkes RI, 2007, Pedoman Penggunaan Obat bebas dan Obat Bebas Terbatas, Direktorat bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Jakarta

Drugbank, 2021, Open Data Drug & Drug Target Database, diakses pada 23 november 2021 <https://go.drugbank.com/drugs/DB00364>

<https://www.mims.com/indonesia/drug/info/hydrocortisone?mtype=generic>
diakses 14 November 2021

<https://www.mims.com/indonesia/drug/info/ketoconazole?mtype=generic>
diakses 14 November 2021

<https://www.mims.com/indonesia/drug/info/elocon>
diakses 23 November 2021.

<https://www.mims.com/indonesia/drug/info/amoxicillin?mtype=generic>
diakses 23 November 2021.

<https://www.mims.com/indonesia/drug/info/flamar>
diakses 23 November 2021.

<https://www.mims.com/indonesia/drug/info/neurobion%20forte%205000?type=brief&lang=id>

diakses 23 November 2021.

<https://www.mims.com/indonesia/drug/info/lansoprazole?mtype=generic>

diakses 23 November 2021.

Hartini, Y.S. dan Sulasmono. 2007. Apotek: Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-undangan terkait Apotek Termasuk Naskah dan Apotek Rakyat. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Ikatan Apoteker Indonesia, 2014, Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.005/PP.IAI/1418/VII/2014 tentang Papan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetika

McEvoy, G.K., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health System Pharmacists, Maryland

Presiden Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Presiden Republik Indonesia, Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Apotek

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/Menkes/Per/Vi/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/Menkes/Per/VII/2010 Tentang penyaluran alat kesehatan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2010 tentang Prekursor

Seto, S., Nita, Y. dan Triana, L. 2012, Manajemen Farmasi Edisi 3, Airlangga University Press, Surabaya.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380/A/SK/VI/83 tentang Tanda Khusus untuk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas.